

**POKOK PEMIKIRAN LEMBAGA ADAT
MELAYU RIAU DALAM PENGELOLAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

**DISAMPAIKAN PADA
FOREST DIALOG
PEKANBARU, 7 MARET 2007**

DAMPAK SOSIAL BUDAYA

- HILANGNYA KEARIFAN LOKAL YANG MENJADI CIRI KHAS MASYARAKAT TEMPATAN KAWASAN HUTAN
- TERGUSURNYA MASYARAKAT TEMPATAN DARI TEMPAT TINGGALNYA.
- MEMUNCULKAN KOMPLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN INVESTOR/ERUSAHAAN

Lihat SKH "Riau Pos" tanggal 3 Maret 2007:

Di Kab. Kampar RAPP dengan masyarakat Rantau Kasih, antara PT. RAKA dengan masyarakat danau Rancang, antara PT. SPI yang dikelola oleh Arara Abadi dengan masyarakat Batu Gajah Tapung, sengketa lain di Rantau Kampar kiri, Tapung Hilir, Tapung Hulu, dan Tapung dan begitu juga di daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau, yang antara lain, Bengkalis, INHU, Siak, Pelalawan. Komplik ini muncul karena penguasaan hutan tidak melibatkan masyarakat, dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, padahal dampak dari rusaknya hutan, masyarakat yang paling merasakan dan dirugikan.

DAMPAK EKONOMI

- PUNAHNYA SUMBER DAYA ALAM, YANG MENJADI SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT, YAKNI :
 1. Rotan, damar, batang sialang, madu, dan binatang buruan (kancil, rusa, pelanduk, kijang)
 2. punahnya ikan dan burung-burung dan unggas
- Hilangnya tanah-tanah kebun masyarakat adat (ulayat) karena penguasaan areal perusahaan yang sangat luas, sehingga hilangnya mata pencaharian masyarakat adat yang pada akhirnya berdampak pada kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan termasuk di wilayah HTI
- Pengelolaan dan pengembangan HTI belum memberi dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan, tetapi justru sebaliknya.

DAMPAK EKOLOGI

- MENIMBULKAN BENCANA ALAM, SEPERTI BANJIR YANG BERAKIBAT HANCUR DAN ATAU TERGANGGU EKOSISTEM
- BENCANA ASAP AKIBAT *LAND CLEARING* DAN BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG SANGAT KOMPLEK SERTA BERDAMPAK LUAS, KARENA ASAP MENJADI PENCEMARAN LEPAS BATAS (*LONG RANGE POLLUTION*)

SARAN DAN USULAN

- Kepada pemerintah untuk tidak menerbitkan lagi izin atas penguasaan hutan, baik HPH, HTI, HGU dan IPK
- Tidak memperpanjang izin penguasaan hutan yang telah habis masa berlakunya
- Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin penguasaan hutan
- Melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengelolaan hutan
- Mencabut keputusan pelelangan terhadap eks. HPH PT. Sibrida Wahana Sejahtera dan PT. Intenational Forest Aquatique yang alihfungsikan untuk HTI. Pelaksanaan pelelangan tidak melibatkan masyarakat dan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat